BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pengembangan kawasan perkotaan baik untuk kabupaten/kota, menjadi acuan dalam pengembangan tata ruang dan rencana pengembangan prasarana dan sarana. Sesuai dengan UU 26/2007 tentang penataan ruang, telah diatur bahwa penataan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dimana struktur ruang adalah pusat – pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara herarki mempunyai hubungan fungsional, dan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan untuk fungsi budidaya. Sejalan dengan hal tersebut, perlu didasari bahwa semua pembangunan bidang PU/Cipta karya mempunyai dimensi "ruang" dan merupakan instrument dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang, sebagai bagian dari pemanfatan ruang. Lingkup Pembangunan bidang PU/Cipta karya sendiri meliputi pembangunan dengan komponen sektor – sektor jalan kota, pengendalian banjir, air minum, penyehatan lingkungan, pengembangan pemukiman, dan pebatasan ruang. Oleh karena itu dalam penyusunan RPIJM bidang PU/cipta karya harus didasari pada penataan ruang yang menjadi acuan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan.

Selain kajian pembelajaran ini untuk peningkatan pengetahuan masyarakat lebih dari itu diperlukan usaha – usaha membangkitkan kesadaran diri. Karena pembelajaran yang sesungguhnya adalah peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku. Bentuk penyajian informasi yang transparan dan menerima feed back adalah suatu kesatuan, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Informasi juga merupakan faktor yang menentukan maju mundurnya pembangunan selain Selain komunikasi dan transportasi. Tidak mengeherankan minimnya pengetahuan masyarakat terjadi sebagai akar masalah dari dampak masalah pembangunan lainnya. Hal ini terjadi karena adanya perilaku penyembunyian informasi, baik itu data perencanaan, proses dan hasil pembangunan. Perilaku ini bisa dikategorikan adanya pemerintahan yang tidak bersih dan jujur. Jika ada pemerintahan yang tidak transparan berarti ada dampak penyakit tidak tranparan yaitu korupsi. Perilaku tambahannya adalah mengutamakan kepentingan birokrasi pemerintahan dan kepentingan aparatur yang berlebihan, hal – hal ini merupakan bagian perilaku yang menyelimuti penyakit korupsi. Gejala awal dari penyakit korupsi adalah perilaku penyembunyian data atau tidak trasparan. Salah satu elemen penting penyelenggaraan negara yang terbuka yang memberikan ruang kebebasan hak publik untuk memperoleh informasi sesuai kebutuhan masyarakat atas dasar peraturan perundang – undangan. Dengan demikian hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbukannya penyelenggaraan negara diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relefan dengan meningkatkan kualitas

pelibatan masyarakat, Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa terlibat penuh dalam pengambilan keputusan, pengawasan publik bukan menjadi tanggung jawab namun akan kembali menjadi hak karena masyarakat telah mengetahui informasi pembangunan.

Berdasarkan pemikiran tersebut perlu dilakukan upaya – upaya untuk meningkatkan transparansi kebijakan publik sebagai bagian dari proses pembelajaran masyarakat. Beberapa kegiatan muatannya antara lain, pertama kajian oleh masyarakat untuk menggali, menemukan masalah, menentukan solusi dan prioritas penanganan masalah. Kedua seminar – seminar hasil penelitian, ketiga diskusi – diskusi yang meliputi diskusi kelompok sasaran (*focus group discusi*) dan diskusi publik dengar pendapat (*public dsicussion*) dan lain-lain. Banyak kenyataan laju pertumbuhan pembanguna tidak selalu memberikan dampak positif ada juga yang negatif. Sering terjadi dampak pembangunan positif yang akan diolah dan disajikan dalam bentuk informasi publik sebagai bahan informasi saja tanpa meminta tanggapan apa dan bagaimana infromasi itu. Sedangkan untuk informasi dampak negatif tidak disajikan sebagai bahan santapan kebutuhan informasi. Ada anggapan jika masyarakat mengetahui akan mengganggu sistem birokrasi bahkan informasi itu rahasia dan milik negara. Jika melihat kedua hal yang menjadi dampak pembangunan baik itu positif dan negatif, maka model penyajian seperti ini adalah pembohongan publik besar – besaran. Karena hak masyarakat dirampas lalu masyarakat tidak mengetahui dampak dari perilaku perampasan hak tersebut. Mereka hanya korban dari pembohongan. Penyebab informasi negatif pembangunan yang tidak disajikan

tersebut dikelompokan menjadi dua yaitu pertama faktor ketidak sengajaan yaitu tertimbun karena tumpukan arsip daerah, terlupakan dari banyak informasi, tenggelam kedalam penyakit ingatan yaitu lupa dan habis dimakan waktu. Kedua faktor kesengajaan yaitu disembunyikan dan diasingkan, faktor ini disebut wujud sifat menutup perbuatan KKN diistilahkan sebagai kelakuan menyembunyikan kelakuan. Jika hendak ditelusuri ternyata banyak sekali kegagalan, ketimpangan, kekurangan, ketumpangan dan ketindian pembangunan yang seharusnya dijadikan bahan siap saji yang dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan publik. Tidak perlu ditakuti jika dinilai kinerja pelaksana pemerintahan tidak baik mamun jika penilaian itu ada berarti hal ini bagian dari *feed back* dari sajian informasi itu.

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan informasi yang baik, khususnya mengenai perkembangan maupun keadaan suatu wilayah secara *on-line*, maka sangat dibutuhkan teknologi yang tepat sehingga dapat diperoleh berbagai keuntungan. Dalam hal ini adalah teknologi informasi pemerintahan yang bebasis internet. Oleh karena itu, penulis merancang sedemikian rupa tampilan dari web pemerintahan ini, dengan maksud agar lebih menarik minat masyarakat untuk mengakses web ini serta para pengguna bisa mendapatkan informasi yang diinginkan mengenai wilayah pemerintahan tersebut.

Dalam aplikasi *e-goverment* ini, penulis menggunakan MapServer sebagai perangkat lunak pendukung untuk mengolah peta dasar sekaligus keterangan legenda dalam peta tersebut. Dengan menggunakan MapServer, maka pengolahan

peta dapat dilakukan dengan mudah serta MapServer sekaligus berfungsi sebagai penghubung atau *interface* antara peta dasar kedalam tampilan web.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mempelajari lebih jauh tentang pembuatan aplikasi *e-goverment* Untuk itu, penulis mengambil judul **“ Sistem Informasi Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Cirebon Berbasis web”.**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Identifikasi Masalah merupakan rangkuman dari isu masalah yang terjadi yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bahasan latar belakang. Suatu masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan menjadi jelas dan tidak menimbulkan pengertian yang berbeda-beda.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari keterangan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam sistem informasi geografis ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya informasi mengenai perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon
2. Belum adanya Sistem Informasi perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon yang menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan datanya.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengolahan data mengenai perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon.
2. Bagaimana memberikan informasi mengenai Perencanaa Pembangunan Daerah Kota Cirebon.
3. Bagaimana pengujian Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.
4. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari suatu penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris dan untuk menemukan kejelasan yang diteliti dalam upaya mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan Tujuan Penelitian itu menekankan pada hasil yang akan dicapai (diharapkan) dari penelitian yang terkait dengan identifikasi dan rumusan masalah.

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maksud dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sebuah Sistem Informasi Perancangan Pembanguna Daerah Kota Cirebon Berbasis Web untuk memudahkan Pemerintah Kota Cirebon dalam mengelola data beserta informasi yang ada di wilayah pemerintahannya.

2.3.1 Tujuan Penelitian

1. Membuat sebuah aplikasi untuk memberikan informasi tentang Perencanaan dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.
2. Menginformasikan kondisi perencanaan dan kegiatan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.
3. Aplikasi yang dibuat bersifat dinamis dan interaktif sehingga dapat memberikan informasi yang *up to date*.
4. Aplikasi dibuat dengan sistem kemanan sehingga keamanan data lebih terjaga.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian itu menjelaskan mengenai manfaat/kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, kegunaan penelitiannya dapat berupa kegunaan praktis dan kegunaan akademis.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dapat mengetahui bagaimana membangun sebuah aplikasi *e-goverment* yang dinamis dan interaktif yang berbasis Web.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang memerlukannya sebagai referensi, bahan perbandingan maupun sumbangan pemikiran.

1.5 Batasan Masalah

Web ini hanya sebatas memberikan informasi kepada pengunjung. Selain itu, user juga dapat mengakses peta sekaligus kondisi geografis Kota Cirebon. Batasan masalah juga meliputi mekanisme aturan-aturan yang ditetapkan oleh aplikasi yang mempengaruhi layanan terhadap user, juga pengelolaan halaman web agar mudah digunakan dan dimengerti oleh user.

Untuk membatasi agar masalah lebih sederhana, maka digunakan batasan masalah sebagai berikut ini :

1. Sistem Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ini hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana Kota Cirebon serta profil dari BAPPEDA.
2. Data yang digunakan dalam perancangan aplikasi sistem informasi ini yaitu data tekstual dan data peta digital (spatial).
3. Informasi disajikan berupa data tekstual beserta data visualisasi geografis mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di Kota Cirebon.
4. Admin dari Sistem Informasi ini yaitu karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cirebon

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi Kerja Praktek yaitu di kantor PT.Citra Bumi Madani yang beralamat di kantor cabang Jalan Tubagus Ismail Dalam No. 51A Bandung. Sedangkan waktu pelaksanaan Penelitian dan Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011. Untuk jadwal penelitian secara lengkap dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian

No.	Kegiatan	Agustus 2011				Sept 2011				Okt 2011					Nov 2011				Des 2011				
1.	Penyusunan Proposal																						
2.	Koordinasi dan konsultasi data																						
3.	Analisis Masalah																						
4.	Identifikasi kebutuhan sistem dan pengguna																						
5.	Desain sistem informasi geografis																						
6.	Pengkodean program aplikasi																						
7.	Koordinasi dan konsultasi akhir program aplikasi																						
7.	Pengujian dan Penyusunan Rencana Implementasi sistem informasi geografis																						
8.	Sosialisasi Program aplikasi																						
9.	Penyusunan Laporan Akhir																						